

H BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Kota Bandung

4.1.1.1 Sejarah Singkat Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang sudah cukup lama berdiri. Berdasarkan catatan sejarahnya kota yang terkenal dengan julukan “Kota Kembang” ini berdiri sekitar dekade pertama abad ke-19. Kota ini didirikan setelah terlebih dahulu berdiri Kabupaten Bandung.

Sejak tanggal 1 April 1906 (dijadikan sebagai hari jadi Kota Bandung), Dayeuh Bandung ditetapkan oleh J.B. Van Heutz menjadi *Geimeente* sesuai dengan Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 29 Februari 1906, yaitu bahwa kota Bandung dibentuk sebagai suatu daerah otonom yaitu daerah yang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adapun isi pokok dari ordonansi pembentukan *Geimeente* Bandung adalah sebagai berikut:

1. Bandung dinyatakan sebagai *Geimeente* yang berpemerintahan.
2. Untuk menjalankan tugas dan kewajiban Pemerintah *Geimeente* diberikan modal pertama sebesar F. 46,775 yang disisihkan dari Anggaran Belanja Pemerintahan Kolonial.
3. Tugas dan kewajiban yang dijalankan berupa:
 - a. Pembentukan pemeliharaan sarana kota seperti jalan umum, jembatan, saluran air hujan, dan lain-lain.

- b. Pembuangan sampah dari pekarangan, pertamanan, dan jalan
- c. Pencegahan kebakaran termasuk pemeliharaan gardu-gardu, pembuatan dan pemeliharaan kuburan-kuburan umum di dalam atau di luar *Geimeente*.
- d. Perangkat pemerintahan *Geimeente* secara *ex officio* diketahui oleh *assistant*.
- e. Cara penyelenggaraan tugas dan kewajiban adalah dengan jalan pemberitahuan kewajiban dan wewenang dengan membuat peraturan-peraturan.
- f. Wewenang yang diberikan kepada pemerintahan *Geimeente* disertai dengan restriksi (pembatasan), yaitu tidak boleh mengatur apa-apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan tidak bertentangan dengan yang telah ditetapkan.

Pada waktu itu luas kota Bandung baru sekitar 1900 Ha dengan dua kecamatan yang meliputi 14 desa. Seiring dengan perubahan tahun, kemajuan jaman serta bertambahnya penduduk, maka kota Bandung pun berkembang. Perubahan-perubahan dalam sebutan kota Bandung sejak dibentuknya *Geimeente* adalah sebagai berikut:

1. *Geimeente* Bandung (1906-1926)
2. *Staads* (mulai 1 Oktober 1926 sampai dengan awal Pemerintahan Jepang).
3. Bandung Si (Jaman Pemerintahan Jepang)
4. *Harminte* Kota Bandung (11 Maret 1950, UU No. 22 tahun 1948 masa berlakunya Negara Pasundan)

5. Kota Besar Bandung (15 Agustus 1950, berdasarkan UU No. 16 tahun 1950)
6. Kota Praja Bandung (sesuai dengan UU No.1 tahun 1957, tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah di Indonesia).
7. Kotamadya Bandung (berdasarkan UU No.18 tahun 1965, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah).
8. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (UU No.5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah).
9. Kota Bandung (UU No. 22 tahun 1999).

Landasan pembentukan Pemerintahan Kota Bandung di Indonesia pada dasarnya semenjak tahun 1945 dibentuk atas dasar pasal 28 UUD 1945 sebagai realisasi dari pasal tersebut, maka semenjak itu undang-undang yang telah mengatur tentang Kota Bandung secara berturut-turut sebagai berikut:

1. UU No. 1 tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional daerah.
2. UU No. 52 tahun 1948 tentang Undang-undang Pokok Pemerintahan daerah.
3. UU No. 44 tahun 1950 tentang Undang-undang atau Peraturan Pokok Pemerintahan Daerah.
4. UU No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
5. Ketetapan Presiden No. 6 tahun 1956 tentang Pemerintahan Daerah.
6. UU No. 1 tahun 1965 tentang Desa Praja Daerah.

4.1.1.2 Visi Pemerintah Kota Bandung

Visi dari Kota Bandung adalah : “Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT. (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat)

Untuk merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama elemen seluruh masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut yaitu :

1. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah, dan bersih praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyakit masyarakat (judi, pelacuran, narkoba, premanisme dan lainnya), dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral dan agama dan budaya masyarakat atau bangsa;
2. Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya;
3. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum dan aturan - aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota;
4. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan. Secara harfiah, Bermartabat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan dan kedisiplinannya.

Jadi kota jasa yang bermartabat adalah kota yang menyediakan jasa pelayanan yang didukung dengan terwujudnya kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinan masyarakatnya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada kurun waktu lima tahun kedepan diperlukan langkah dan tindakan pemantapan (revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionalisasi) yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung beserta masyarakatnya serta didukung secara politis oleh pihak legislatif melalui upaya-upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

4.1.1.3 Misi Pemerintah Kota Bandung

Misi adalah tugas yang diemban pemerintah kota Bandung meliputi :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
3. Mengembangkan sosial budaya kota yang ramah dan berkesadaran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan *gender*.

4. Meningkatkan penataan kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota.
5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem keuangan kota, mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

Rencana Strategik Pemerintah Kota Bandung Tahun 2004-2008 Arah Kebijakan Pembangunan

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan, Kesehatan serta pelayanan keagamaan bagi seluruh masyarakat.
2. Mengupayakan peningkatan kegiatan perekonomian kota berbasis potensi daerah.
3. Mendorong peningkatan integrasi dan ketahanan sosial masyarakat serta peningkatan rasa kepedulian sosial masyarakat.
4. Mengupayakan perluasan dan pemerataan pelayanan prasarana dan sarana kota serta pengembangan aktivitas kota yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan kota.
6. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan potensi pembiayaan pembangunan kota.

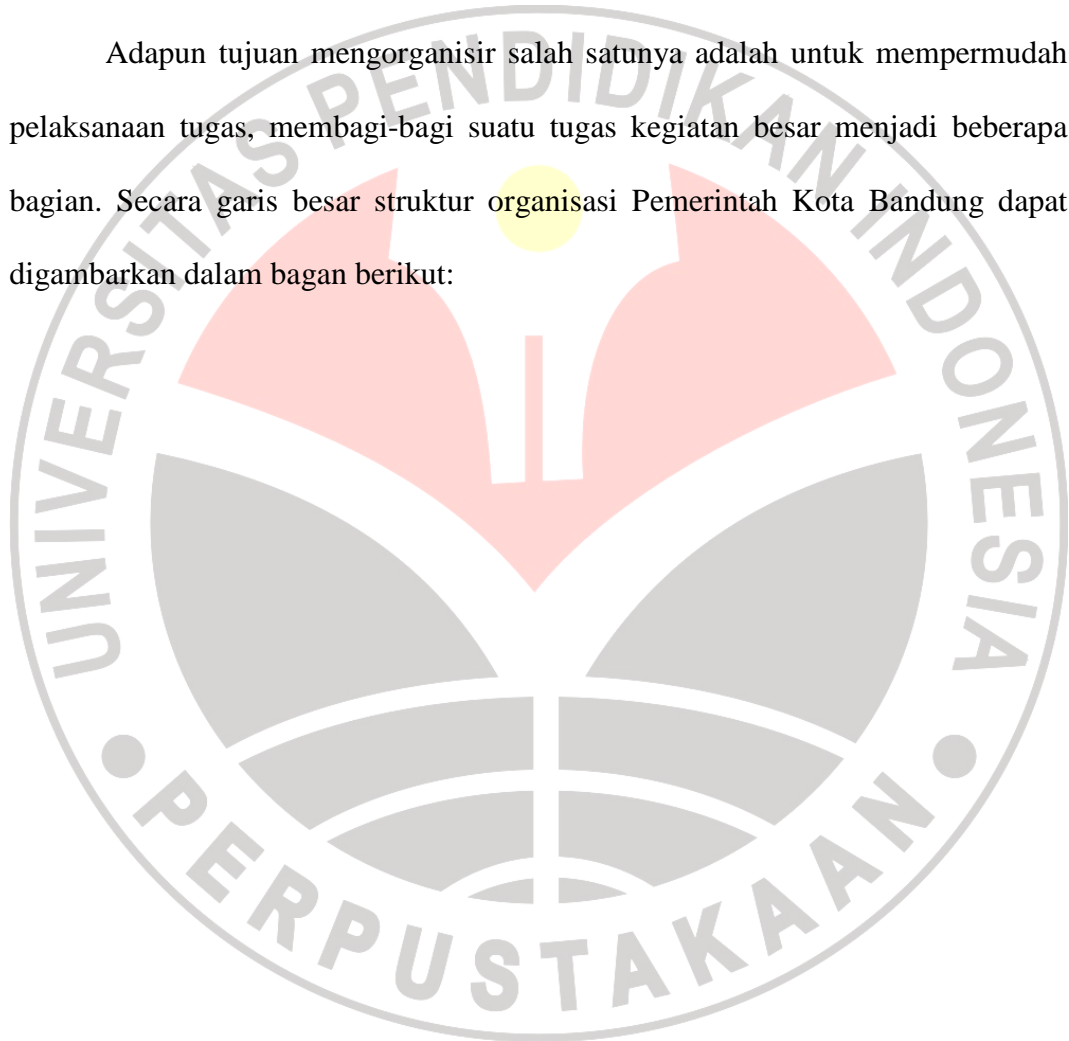
Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut diatas, maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang menjadi kunci keberhasilan. Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut meliputi:

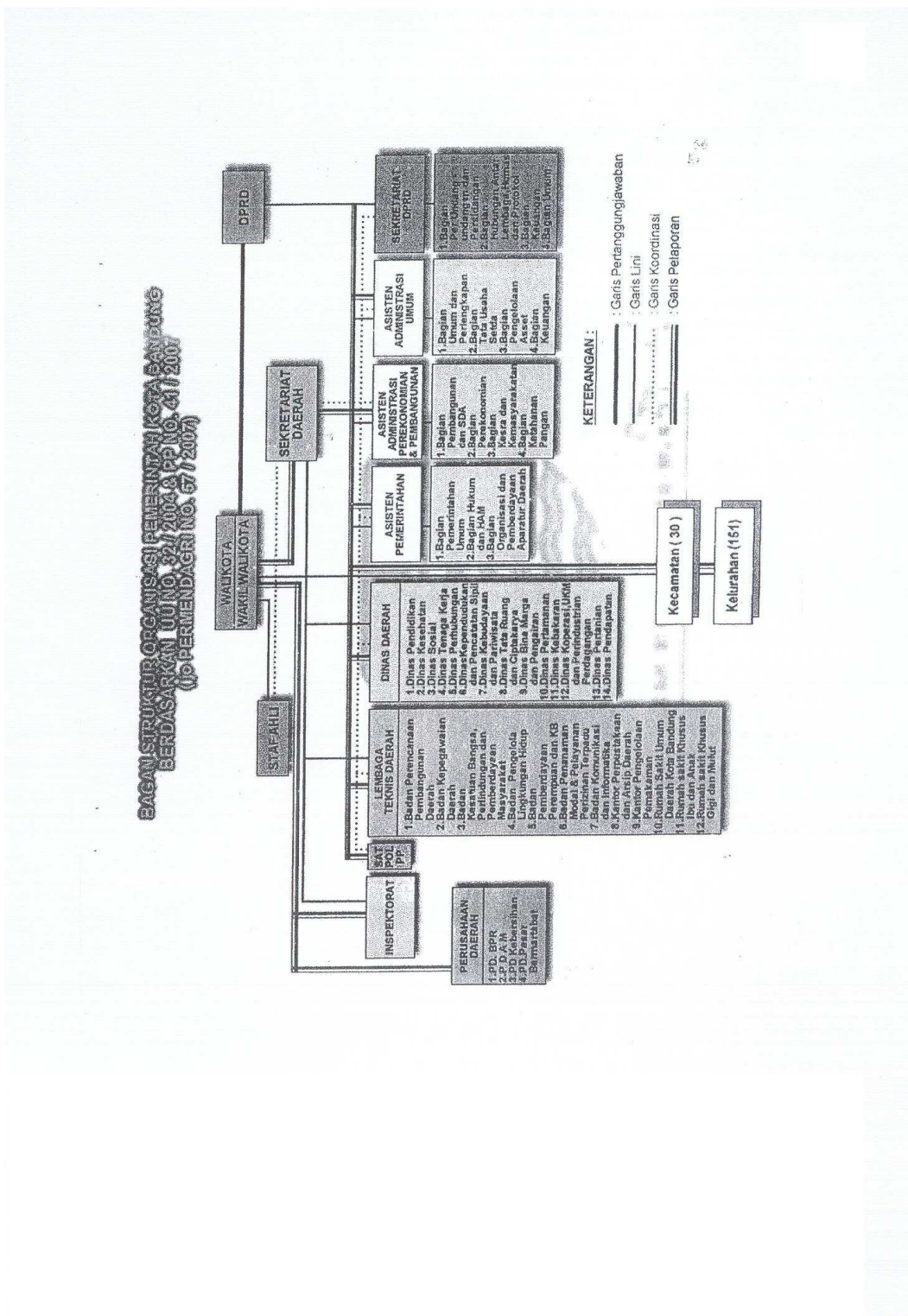
1. Komitmen yang kuat dari seluruh pelaku pembangunan baik unsur eksekutif, legislatif maupun komponen masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan lembaga-lembaga atau pusat-pusat penelitian dan pembangunan iptek untuk membangun Kota Bandung.
2. Susunan dan situasi keamanan Kota Bandung yang kondusif, baik untuk aktivitas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta meningkatkan daya tarik investasi kota.
3. Posisi Kota Bandung sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat yang memiliki aksesibilitas yang tinggi, dengan berbagai level pemerintahan serta dikenal luas oleh masyarakat internasional.
4. Adanya komitmen untuk menegakkan supremasi hukum.
5. Situasi dan kondisi perekonomian di tingkat regional dan nasional yang cukup baik berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kota.

4.1.1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung (PP No 41 Tahun 2007)

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran secara skematik tentang bagian-bagian dan tugas-tugas, tanggungjawab serta hubungan bagian yang terdapat dalam suatu badan atau lembaga.

Adapun tujuan mengorganisir salah satunya adalah untuk mempermudah pelaksanaan tugas, membagi-bagi suatu tugas kegiatan besar menjadi beberapa bagian. Secara garis besar struktur organisasi Pemerintah Kota Bandung dapat digambarkan dalam bagan berikut:





Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung

4.1.2 Deskripsi Data Variabel

4.1.2.1 Perkembangan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah yang didapat oleh pemerintah Kota Bandung dimaksudkan untuk membiayai segala kegiatan pembangunan di daerah dan merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan maksimalisasi kemakmuran rakyat. Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut ini adalah tabel tentang sumber-sumber pendapatan daerah.

Tabel 4.1
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2001-2007

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Pendapatan Daerah	Perkembangan Pendapatan Daerah (%)
2001	123.984.485.749	511.988.159.296	131.177.277.238	781.262.482.404	0
2002	182.064.238.544	526.004.617.855	114.038.529.019	843.811.909.467	8.01
2003	213.029.461.862	706.085.650.700	42.453.655.000	961.568.767.563	13.96
2004	222.909.941.953	860.471.704.276	35.380.000.000	1.118.761.646.229	16.35
2005	225.596.438.613	861.550.818.511	35.949.899.246	1.123.097.156.370	0.39
2006	253.882.919.543	1.139.910.819.397	3.917.875.476	1.397.711.614.416	24.45
2007	2887.249.534.045	1.097.176.115.472	301.213.229.376	1.685.638.878.893	20.60

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun Anggaran 2001-2007 (diolah)

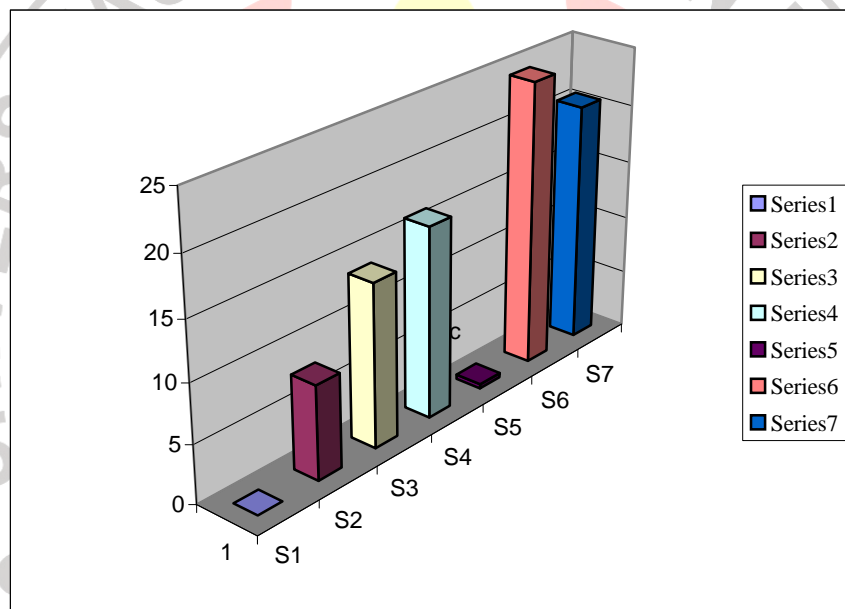
Dari tabel 4.1 di atas, PAD dan dana perimbangan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah setiap tahunnya ada yang naik tetapi pada beberapa tahun anggaran ada pula yang mengalami penurunan. PAD Kota Bandung walaupun lebih kecil dari dana perimbangan tapi tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal ini berarti

Pemerintah sudah berusaha untuk memaksimalkan potensi daerahnya. Penyumbang terbesar dari pendapatan daerah yang diperoleh Kota Bandung adalah dari dana perimbangan, hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah masih belum maksimal dalam mengelola potensi daerah untuk mendapatkan PAD, padahal kebutuhan Pemerintah Daerah untuk membangun daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga dana dari Pemerintah Pusat sangat diandalkan.

Jumlah pendapatan daerah pada Pemerintah Kota Bandung dari tahun anggaran 2001-2007 menunjukkan peningkatan. Hampir dari setiap tahun anggaran pendapatan daerah selalu mengalami kenaikan. Jumlah pendapatan tertinggi yang didapat oleh Pemerintah Kota Bandung adalah pada tahun anggaran 2007 yaitu sebesar Rp 1,685,638,878,893 dan jumlah pendapatan terendah sebesar Rp 781,262,482,404 terjadi pada tahun anggaran 2001. Sedangkan rata-rata pendapatan daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Bandung dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp 7,911,852,455,342. Untuk perkembangan dari pendapatan daerah, perkembangan tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 24.45%. Sedangkan penurunan pendapatan daerah tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2005 sebesar 0.39%. Jadi, rata-rata kenaikan pendapatan daerah dari Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2001 sampai tahun anggaran 2007 setiap tahunnya adalah sebesar 11.96%.

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Bandung terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Perkembangan

pada pendapatan daerah Pemerintah Kota Bandung mengindikasikan pemerintah sudah dapat melaksanakan otonomi daerah, karena pada dasarnya tujuan dari otonomi daerah itu adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Untuk melihat lebih jelas peningkatan dan penurunan pendapatan daerah pada Pemerintah Kota Bandung selama 7 tahun anggaran yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Gambar 4.2 Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun anggaran 2001-2007 (dalam persen)

4.1.2.2 Perkembangan Belanja Pelayanan Publik

Belanja pelayanan publik adalah biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat eksternal yaitu berupa pemenuhan sarana dan prasarana yang menjadi kepentingan dan kebutuhan publik guna menjalankan fungsi pemerintahan sebagai motivator dan fasilitator dalam

pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Belanja pelayanan publik terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal/pembangunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Komponen Belanja Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2001-2007

Tahun	Belanja Administrasi Umum	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	Belanja Modal/Pembangunan	Belanja Pelayanan Publik	Perkembangan Belanja Pelayanan Publik (%)
2001	-	-	197.289.789.723	197.289.789.723	0
2002	-	-	186.606.247.999	186.606.247.999	-5.42
2003	212.620.156.553	96.192.307.145	26.851.738.562	463.163.252.360	148.20
2004	354.554.631.611	96.555.489.960	13.993.957.319	465.104.078.890	0.42
2005	341.681.620.361	134.591.785.249	81.755.770.127	558.029.175.737	19.989
2006	411.620.173.796	161.253.796.234	66.070.268.849	638.944.236.879	14.50
2007	*	*	*	568.682.866.874	-11.00

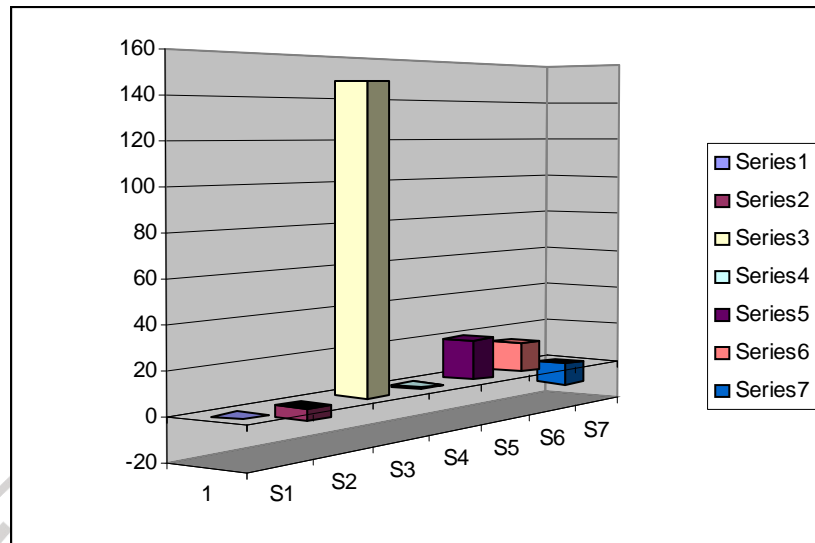
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bandung Tahun Anggaran 2001-2007 (diolah)

Dari tabel 4.2 di atas, setiap komponen belanja mengalami peningkatan. Walaupun pada belanja modal/pembangunan ada beberapa tahun anggaran yang mengalami penurunan, seperti pada tahun anggaran 2002, 2003, 2004 dan tahun anggaran 2006. Untuk tahun anggaran 2007 tidak terdapat jumlah dari tiap komponen belanja karena keterbatasan data.

Adapun jumlah pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung dari tahun anggaran 2001 sampai tahun anggaran 2007 menunjukkan peningkatan. Hampir dari setiap tahun anggaran belanja pelayanan publik terus mengalami kenaikan. Walaupun ada dari beberapa tahun yang mengalami penurunan, tetapi itu hanya terjadi pada dua tahun, yaitu tahun anggaran 2002 dan tahun anggaran 2007, sedangkan yang lainnya terus mengalami kenaikan.

Jumlah belanja tertinggi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung adalah pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar Rp 638,944,236,879 dan jumlah belanja terendah sebesar Rp 186,606,247,999 terjadi pada tahun anggaran 2002. Sedangkan rata-rata belanja pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp 3,077,819,648,462. Untuk perkembangan dari belanja pelayanan publik, perkembangan tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2003 yaitu sebesar 148.20%. Sedangkan penurunan belanja pelayanan publik tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2007 sebesar 11%. Jadi, rata-rata kenaikan belanja pelayanan publik dari Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2001 sampai tahun anggaran 2007 setiap tahunnya adalah sebesar 23.81%.

Dapat disimpulkan bahwa belanja pelayanan publik yang dibelanjakan oleh Pemerintah Kota Bandung terus mengalami perkembangan setiap tahunnya, kecuali pada beberapa tahun anggaran, yaitu tahun 2002 dan tahun 2007. Dengan meningkatnya belanja pelayanan publik, Pemerintah sudah melaksanakan otonomi daerah, karena tujuan dari otonomi daerah itu adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Untuk melihat lebih jelas peningkatan dan penurunan belanja pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung selama 7 tahun anggaran yaitu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Gambar 4.3: Perkembangan Belanja Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2001-2007 (dalam persen).

4.1.3 Analisis Statistik Data

Tujuan dari analisis statistik data adalah untuk mengetahui apakah pendapatan daerah (variabel X) mempunyai pengaruh positif atau tidak terhadap belanja pelayanan publik (variabel Y) pada Pemerintah Kota Bandung.

4.1.3.1 Pengujian Koefisien Korelasi Perason Product Moment

- Perhitungan Manual

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$= \frac{7(375.57) - (79.12)(30.78)}{\sqrt{\{7(955.50) - (79.12)^2\} \{7(154.76) - (30.78)^2\}}}$$

$$= 0.803$$

- Perhitungan Dengan SPSS versi 15

Correlations

		pendapatan daerah	belanja pelayanan publik
pendapatan daerah	Pearson Correlation	1.000	.803*
	Sig. (2-tailed)	.	.030
	N	7	7
belanja pelayanan publik	Pearson Correlation	.803*	1.000
	Sig. (2-tailed)	.030	.
	N	7	7

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Dari hasil perhitungan di atas, maka diperoleh nilai koefisien korelasi antara pendapatan daerah dengan belanja pelayanan publik adalah sebesar 0.803 sama dengan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS versi 15, yaitu sebesar 0.803. Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi pada tabel 3.2, nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara pendapatan daerah dengan belanja pelayanan publik.

4.1.3.2 Pengujian Koefisien Regresi

- Perhitungan Manual

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2} \\
 &= \frac{(30.78)(955.50) - (79.12)(375.57)}{7(955.50) - (79.12)^2} \\
 &= -0.72
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b &= \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2} \\
 &= \frac{7(375.57) - (79.12)(30.78)}{7(955.50) - (79.12)^2} \\
 &= 0.45
 \end{aligned}$$

- Perhitungan Menggunakan SPSS versi 15

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.716	1.753		-.409	.700
	pendapatan daerah	.452	.150	.803	3.015	.030

a. Dependent Variable: belanja pelayanan publik

Berdasarkan perhitungan manual, persamaan regresi yang didapat adalah $\hat{Y} = -0.72 + 0.45X$. Hasil perhitungan ini sama dengan hasil perhitungan SPSS versi 15 pada tabel *coefficients* kolom *unstandardized coefficients*, dengan nilai a = -0.72 dan b = 0.45.

4.1.3.3 Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja pelayanan publik, maka digunakan perhitungan koefisien determinasi sebagai berikut ini:

- Perhitungan Manual

$$\begin{aligned}
 Kd &= r^2 \times 100\% \\
 &= 0.803^2 \times 100\% \\
 &= 64.5\%
 \end{aligned}$$

- Perhitungan Dengan Bantuan SPSS versi 15

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.803 ^a	.645	.574	1.17443808	1.539

a. Predictors: (Constant), pendapatan daerah

b. Dependent Variable: belanja pelayanan publik

Koefisien determinasi dari data di atas adalah sebesar 64.5%. Hal ini berarti bahwa pendapatan daerah mempunyai pengaruh sebesar 64.5% terhadap belanja pelayanan publik.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bandung

Pendapatan Daerah Kota Bandung dimaksudkan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah yang berhubungan dengan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik (*public service*). Pendapatan daerah ini pada dasarnya merupakan penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan deskripsi data variabel sebelumnya, pendapatan daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Bandung cenderung terus mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 11.96% dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2007 (7 tahun). Jumlah pendapatan daerah tertinggi yang diperoleh Pemerintah Kota Bandung adalah pada tahun anggaran 2007 yaitu sebesar Rp 1,685,638,878,893 dan jumlah pendapatan terendah sebesar Rp 781,262,482,404 terjadi pada tahun anggaran 2001. Untuk perkembangan dari pendapatan daerah, perkembangan tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2007 yaitu sebesar 24.45%. Sedangkan penurunan pendapatan daerah tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2005 sebesar 0.39%.

Kondisi pendapatan daerah yang cenderung terus mengalami peningkatan ini tidak lepas dari upaya dan kinerja pemerintah dalam meningkatkan

pendapatan. Peningkatan ini terutama didorong oleh keinginan pemerintah untuk melaksanakan otonomi daerah. Dengan meningkatnya pendapatan daerah maka pembangunan di daerah akan terlaksana dengan baik. Bukan hanya itu saja pemerintah pun dapat melaksanakan tujuan maksimalisasi kemakmuran rakyat.

4.2.2 Belanja Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bandung

Belanja pelayanan publik adalah biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat eksternal yaitu berupa pemenuhan sarana dan prasarana yang menjadi kepentingan dan kebutuhan publik guna menjalankan fungsi pemerintahan sebagai motivator dan fasilitator dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bandung. Belanja pelayanan publik yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2001 sampai tahun anggaran 2007 cenderung mengalami peningkatan. Belanja pelayanan publik tertinggi adalah pada tahun anggaran 2003, yaitu sebesar 148,20%, sedangkan belanja pelayanan publik terendah terjadi pada tahun anggaran 2007 yaitu sebesar -11.00%.

Belanja pelayanan publik yang cenderung terus mengalami peningkatan adalah suatu bukti bahwa pemerintah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (publik) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menunjukkan niat baik (*political will*) pemerintah kepada masyarakat.

4.2.3 Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Pelayanan Publik pada Pemerintah Kota Bandung

1. Koefisien Korelasi Pearson Product Moment

Nilai koefisien korelasi yang didapat adalah sebesar 0.803. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara pendapatan daerah dengan belanja pelayanan publik. Yang berarti, tanpa adanya pendapatan daerah yang diperoleh Pemerintah Kota Bandung maka belanja pelayanan publik tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu hubungan antara pendapatan daerah dengan belanja pelayanan publik sangat kuat.

2. Koefisien Regresi

Nilai koefisien regresi yang didapat adalah $\hat{Y} = -0.72 + 0.45X$. Berikut ini adalah penjelasan dari persamaan regresi tersebut:

- Konstanta sebesar -0.72

Nilai konstanta $a = -0.72$, berarti tanpa adanya pendapatan daerah (X), maka nilai belanja pelayanan publik (Y) pada Pemerintah Kota Bandung adalah -0.72%. Dengan kata lain tanpa adanya pendapatan daerah, pemerintah tetap harus mengeluarkan biaya untuk belanja pelayanan publik, yang artinya pemerintah melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan belanja publik.

- Arah Hubungan

Dari persamaan di atas terlihat tanda (+) yang menggambarkan adanya hubungan positif dari variabel independen (pendapatan daerah) terhadap variabel dependen (belanja pelayanan publik), ini berarti bahwa

peningkatan pendapatan daerah akan menaikkan nilai belanja pelayanan publik.

- Koefisien regresi +0.45

Nilai ini berarti bahwa setiap kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp 1, maka akan menaikkan nilai belanja pelayanan publik sebesar Rp 0.45 atau kenaikan pendapatan daerah sebesar 1% akan menaikkan nilai belanja pelayanan publik sebesar 0.45%.

3. Koefisien Determinasi

Adapun hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai 64.5%. Angka tersebut berarti bahwa variasi naik atau turunnya pendapatan daerah mempengaruhi belanja pelayanan publik pada Pemerintah Kota Bandung sebesar 64.5%, sedangkan sisanya sebesar 35.5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar pendapatan daerah seperti kebijakan politik pemerintah, dana pinjaman dari luar negeri, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Kebijakan politik pemerintah yang dimaksud adalah, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bisa memihak atau tidak memihak kepada publik sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap belanja pelayanan publik. Untuk dana pinjaman dari luar negeri jika dana tersebut digunakan untuk membayar pinjaman yang lain maka tentu saja hal ini tidak akan menaikkan belanja pelayanan publik tapi jika dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka belanja pelayanan publik pun akan mengalami peningkatan, walaupun tetap yang menjadi pengaruh terbesar dari naik atau turunnya belanja pelayanan publik adalah pendapatan daerah.